

**PERANAN PEMERINTAH DALAM PROGRAM GOTONG  
ROYONG DI KELURAHAN SEI KERA HILIR II  
KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN KOTA MEDAN**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**INTAN PRASTIKA  
198510037**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/10/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)5/10/23

**PERANAN PEMERINTAH DALAM PROGRAM GOTONG  
ROYONG DI KELURAHAN SEI KERA HILIR II  
KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN KOTA MEDAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Medan Area

**OLEH:**

**INTAN PRASTIKA  
198510037**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/10/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

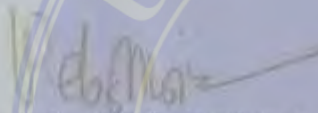
Access From (repository.uma.ac.id)5/10/23


LEMBAR PENGESAHAN

JUDUL : Peranan Pemerintah dalam Program Gotong-Royong di Kelurahan Sei Kera Hilir II Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan.  
NAMA : Intan Prastika  
NPM : 198510037  
FAKULTAS : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Disetujui Oleh :


Komisi Pembimbing

  
Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP  
Pembimbing I

  
Evi Yunita Kurniaty, S.Sos, M.IP  
Pembimbing II

Mengetahui :

  
Dr. Effriati Juliana Hasibuan, M.Si  
Dekan Fakultas FISIPOL

  
Dr. Pembawa Wolandari, S.ST, M.Si  
Ka Prodi Ilmu Pemerintahan

Tanggal lulus :

### HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 19 September 2023



Intan Prastika  
198510037



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Intan Prastika  
NPM : 198510037  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis

Demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : Peranan Pemerintah Dalam Program Gotong Royong Di Kelurahan Sei Kera Hilir II Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan.

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan  
Pada tanggal : 19 September 2023  
Yang menyatakan

( Intan Prastika )



## ABSTRAK

Masyarakat dan lingkungan adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan perilaku dan tindakan masyarakat dalam kesehariannya akan berpengaruh terhadap kebersihan dan kualitas lingkungan. Tetapi fenomena dilapangan masih terdapat banyak masyarakat yang tidak ikut serta dalam melakukan kebijakan gotong royong yang telah pemerintah lakukan di Kelurahan Sei Kera Hilir II. Fakta lapangan yang ada mejadi dorongan penulis untuk mengangkat judul ini ke dalam sebuah penelitian guna untuk mengetahui Bagaimana peranan pemerintah kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program gotong royong di Kelurahan Sei Kera Hilir II dan Apa saja hambatan pemerintah kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program gotong royong di Kelurahan Sei Kera Hilir II. Penulis menggunakan teori peranan menurut Suhardono yaitu peranan sebagai mobilisator, peranan sebagai motivator, peranan sebagai regulator. Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi. Informan dalam penelitian ini ialah lurah, sekretaris lurah, kasi pemerintahan, kasi pembangunan dan masyarakat. Peran pemerintah lurah terhadap pelaksanaan kegiatan gotong royong sudah berjalan dengan baik dalam memberikan arahan serta motivasi untuk melaksanakan kegiatan gotong royong. Adapun faktor penghambat ialah tidak peduli karena sudah ada yang mewakili untuk bergotong royong.

**Kata Kunci : Peranan, Gotong Royong, Kelurahan**

## ABSTRACT

*Society and the environment are something that cannot be separated from people's behavior and actions in their daily lives. In the field, there are still many people who do not participate in carrying out the mutual cooperation policy carried out by the Sei Kera Hilir II Village government. The author uses role theory according to Suhardono's role as a mover, role as a motivator, role as a regulator. This research is descriptive qualitative. Methods of data collection using interviews, observation, documentation. The inhibiting factor is that they don't care because there are already representatives who work together.*

**Keywords:** *Role, Mutual Cooperation, Kelurahan*



## RIWAYAT HIDUP

Penulis skripsi ini bernama Intan Prastika, lahir di lingkungan Kelurahan Sei Kera Hilir II pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2000. Penulis merupakan anak kedua dari lima bersaudara dari pasangan Atik dan Wagirun. Pada tahun 2018, penulis lulus dari SMK Negeri 9 Medan dengan jurusan Desain Komunikasi Visual dan pada tahun 2019 Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Selama aktif dalam kegiatan perkuliahan, penulis juga aktif dalam organisasi kemahasiswaan. Penulis terlibat secara aktif di Ikatan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (IKAMITA) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area periode 2021 – 2022 sebagai anggota Bidang Minat dan Bakat, selanjutnya pada organisasi yang sama penulis diamanahkan sebagai Sekretaris Umum IKAMITA periode 2022-2023.



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. atas berkat dan karunianya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Peranan Pemerintah Dalam Program Gotong Royong di Kelurahan Sei Kera Hilir II Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan ”.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara materil maupun moril, maka untuk itu penulis banyak mengucapkan terimakasih kepada:


1. Bapak Drs. M. Erwin Siregar, MAB selaku Ketua Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim.
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M. Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Effiati Juliana Hasibuan, MSi selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
4. Ibu Dr. Novita Wulandari, S.ST, M. Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
5. Ibu Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Ibu Evi Yunita Kurniaty, S.Sos, M.IP selaku pembimbing II yang telah memberikan banyak saran dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.

7. Ibu Hadiyanti Arini S.Sos, M.AP selaku sekretaris, yang telah memberikan saran dan tanggapan dalam skripsi ini.
8. Kepada Bapak/Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan ilmu dan informasi dalam mengajarkan materi perkuliahan serta staf tata usaha yang membantu penulis.
9. Kedua orang tua saya yang tercinta, orang yang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan saya, Terimakasih untuk semuanya berkat do'a dan dukungan mamak dan bapak intan berada dititik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi agar selalu ada di setiap perjalanan dan pencapaian hidupku, Iloveyou more.
10. Kepada Bapak/Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan ilmu dan informasi dalam mengajarkan materi perkuliahan serta staf tata usaha yang membantu penulis.
11. Seluruh teman-teman stambuk 2019 prodi Ilmu Pemerintahan yang telah banyak membantu dan memberikan semangat kepada penulis, dan selama kurang lebih empat tahun bersama menerima pembelajaran dari Bapak/Ibu dosen banyak suka duka juga kita jalani bersama.
12. Seluruh adinda stambuk 2020 Prodi Ilmu Pemerintahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
13. Kepada teman-teman kepengurusan IKAMITA Periode 2022-2023 yang sama-sama berjuang dengan penulis baik senang maupun susah.

14. Kepada teman-teman terdekat saya Faizal Anwar Siregar, Andira Putri Nirwana, Ferdy Syahputra.
15. Kepada pemilik npm 198510065 yang telah banyak memberi penulis semangat dan dukungan dalam pengerjaan skripsi ini.
16. Kepada senior dan alumni yang banyak membantu penulis dalam mencari referensi serta banyak juga berbagi ilmu atau bertukar pikiran dengan penulis.
17. Kepada para sahabat Nadhila Mastura, Indy Fadillah Sari, Juwita Ayu Dwidyanti, Nining Wulandari yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada saya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tulisan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya saran maupun kritik serta motivasi yang membangun agar dapat menjadi lebih baik lagi sehingga dapat bermanfaat bagi setiap pembaca.

Medan, 19 September 2023

  
Intan Prastika  
198510037

## DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK .....	.....
<i>ABSTRACT</i> .....	.....
RIWAYAT HIDUP .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
II. TINJAUAN PUSTAKA .....	7
2.1 Definisi Peranan .....	7
2.2 Konsep Pemerintahan Kelurahan .....	12
2.3 Pengertian Partisipasi .....	17
2.4 Definisi Masyarakat .....	21
2.5 Definisi Partisipasi Masyarakat .....	22
2.6 Pengetian Gotong Royong .....	23
2.7 Penelitian Terdahulu .....	27
2.8 Kerangka berpikir .....	30
III. METODOLOGI PENELITIAN .....	33
3.1 Jenis Penelitian .....	33
3.2 Lokasi Dan Jadwal Penelitian .....	34
3.2.1 Lokasi .....	34
3.2.2 Jadwal Penelitian .....	34
3.3 Informan Penelitian .....	35
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	36
3.5 Teknik Analisa Data .....	38
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....	40
4.1 Hasil .....	40
4.1.1 Gambaran Umum Kelurahan Sei Kera Hilir II .....	40
4.1.2 Keadaan Geografis Kelurahan Sei Kera Hilir II .....	40
4.1.3 Tujuan dan Sasaran .....	41
4.1.4 Struktur Organisasi .....	42
4.1.5 Penduduk .....	44
4.1.6as Pokok Dan Fungsi Pegawai Kantor Lurah Sei Kera Hilir II	45
4.2 Pembahasan .....	49
4.2.1 Peranan Pemerintah Dalam Program Gotong Royong DI Kelurahan Sei Kera Hilir II Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan .....	49
4.2.2 Faktor Penghambat .....	61
V. SIMPULAN DAN SARAN .....	64
5.1 Simpulan .....	64

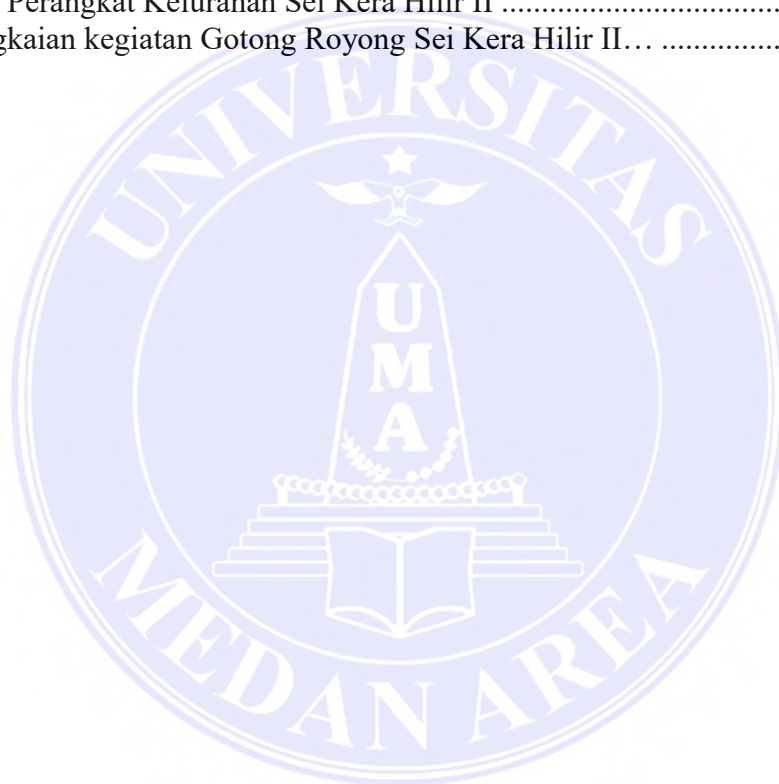
5.2 Saran .....	65
DAFTAR PUSTAKA .....	66
LAMPIRAN.....	68
1. Pedoman Observasi.....	68
2. Pedoman Wawancara .....	69
3. Surat Riset Lapangan .....	70
4. Surat Keterangan Selesai Riset .....	71
3. Hasil Observasi... ..	72
4. Hasil Wawancara .....	74
5. Dokumentasi Penelitian... ..	79





## DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Penelitian Terdahulu .....	28
2. Jadwal Penelitian.....	34
3. Informan Penelitian.....	36
4. Letak Geografis Kelurahan Sei Kera Hilir II .....	41
5. Jumlah Penduduk Kelurahan Sei Kera Hilir II .....	44
6. Data Perangkat Kelurahan Sei Kera Hilir II .....	45
7. Rangkaian kegiatan Gotong Royong Sei Kera Hilir II... ..	49



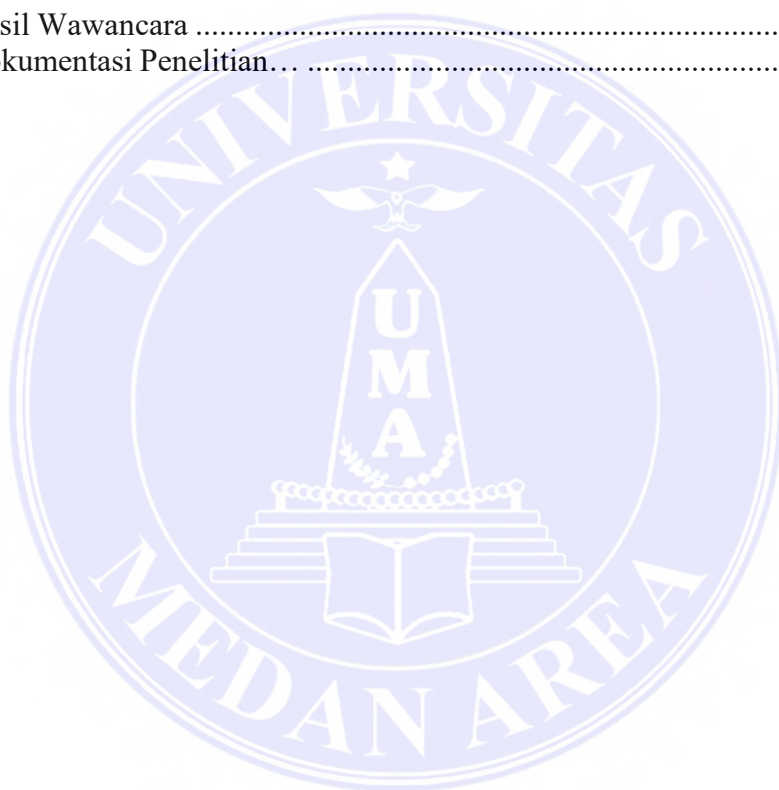
## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Kerangka Berfikir.....	32
2. Bagan Sturktur Organisasi .....	43
3. Undangan Kegiatan Gotong-Royong .....	54
4. Kegiatan Gotong-Royong Bersama Pihak Pemerintah Lurah.....	57
5. Rangkaian Kegiatan Gotong-Royong .....	59



## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Pedoman Observasi.....	68
2. Pedoman Wawancara.....	69
3. Surat Riset Lapangan .....	70
4. Surat Keterangan Selesai Riset .....	71
5. Hasil Observasi... ..	72
6. Hasil Wawancara .....	74
7. Dokumentasi Penelitian... ..	79



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Negara republik indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa. Suku bangsa yang dimaksudkan tersebut tersebar mulai dari sabang sampai merauke. Dengan adanya beberapa wilayah yang mulai memisahkan diri dengan negara kesatuan republik indonesia yang tercipta ini, tidak lantas membuat bangsa indonesia secara umum mengalami perubahan yang cepat. Salah satu karakteristik yang senantiasa akrab dengan bangsa indonesia dengan adanya semangat gotong royong. Menurut kodratnya manusia adalah makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat, selain itu diberikan yang berupa akal pikiran yang berkembang serta dapat dikembangkan. Dalam hubungannya dengan manusia sebagai makhluk sosial, manusia selalu bersama dengan manusia lainnya. Dorongan masyarakat yang dibina sejak lahir akan selalu menampakan dirinya dalam berbagai bentuk, karena itu dengan sendirinya manusia akan selalu bermasyarakat dalam kehidupannya.

Sejak tahun 1999 dikeluarkan berbagai instrument hukum berupa undang-undang dasar (UUD) atau peraturan pemerintah (PP) yang membuka lebar ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan kebijakan publik dan monitoring pembangunan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan secara substansi menempatkan partisipasi masyarakat sebagai instrument yang sangat penting dalam sistem pemerintahan daerah dan berguna untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan sosial, menciptakan rasa memiliki pemerintahan, menjamin, keterbukaan, akuntabilitas dan kepentingan umum, mendapatkan aspirasi masyarakat, dan sebagai wahana untuk agregasi kepentingan

dan mobilitasi dana.

Masyarakat dan lingkungan adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan perilaku dan tindakan masyarakat dalam kesehariannya akan berpengaruh terhadap kebersihan dan kualitas lingkungan. Masyarakat yang telah mementingkan kebersihan lingkungan dipandang sebagai masyarakat yang kualitas hidupnya lebih tinggi dibandingkan masyarakat yang belum mementingkan kebersihan. Lingkungan hakekatnya haruslah bersih agar mendapatkan kualitas kesehatan yang lebih baik dan juga kenyamanan tempat tinggal (Samrah dkk, 2020).

Dengan meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kesadaran melakukan pengelolaan sampah dengan ikut serta dalam kebijakan kelurahan seperti gotong royong seharusnya sudah memiliki kesadaran yang cukup tinggi, tetapi fenomena dilapangan masih terdapat banyak masyarakat yang tidak ikut serta dalam melakukan kebijakan gotong royong yang telah pemerintah lakukan terutama di kelurahan Sei Kera Hilir II Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan. Sehingga kehidupan masyarakat di kelurahan sei kera hilir II dapat meningkatkan kesadaran akan kebersihan lingkungan di kelurahan sei kera hilir II dengan adanya kebijakan gotong royong yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan sei kera Hilir II yang dilakukan hampir setiap minggunya.

Kehidupan manusia dalam masyarakat tidak terlepas dari adanya interaksi sosial antara sesamanya contohnya, dalam melakukan kegiatan imunisasi atau posyandu dan vaksin dipekarangan rumah warga, pekerjaan ini tidak bisa dilakukan oleh satu orang sehingga membutuhkan pertolongan orang lain dan menjalin hubungan serta interaksi antar masyarakat agar dapat diselesaikan dengan cepat, tepat waktu, dan pekerjaan pun menjadi ringan. Di dalam kehidupan masyarakat diperlukan adanya partisipasi, Kerjasama, dan sikap gotong royong dalam



menyelesaikan segala permasalahan kegiatan pembangunan.

Berdasarkan pra observasi awal oleh peneliti, banyak masyarakat yang mengeluh terhadap lingkungannya yang sering terjadi banjir apabila terjadi curah hujan yang tinggi, banjir tersebut terjadi akibat selokan yang penuh dengan sampah dan tanah yang tertimbun dan juga aliran air yang rendah, namun untuk pelaksanaan Kerjasama membersihkan selokan tersebut masyarakat tidak mau ikut berpartisipasi, keadaan lingkungan dikelurahan ini dikategorikan kotor, seperti ditemukan banyaknya limbah dan sampah rumah tangga memenuhi aliran selokan dilingkungan tersebut, selain itu dikelurahan ini setiap rumah hampir tidak memiliki tempat sampah sehingga sampah dibiarkan menumpuk didepan halaman rumahnya. Pada kegiatan posyandu ibu-ibu dilingkungan tersebut juga tidak memiliki antusias yang tinggi untuk membawa anak balitanya imunisasi, pada pra observasi awal peneliti, kegiatan tersebut sudah dihadirkan tim medis yang akan memberikan imunisasi dan ada tim penyelenggara posyandunya dan juga dihadiri oleh salah satu pegawai pemerintah lurahnya, namun antusias dari masyarakatnya yang sangat minim.

Terkait dengan partisipasi masyarakat dalam mempertahankan budaya gotong royong di Kelurahan Sei Kera Hilir II mulai memprihatinkan ataupun mulai hilang. Kurangnya kesadaran dari masyarakat setempat untuk terlibat dalam pembangunan, kurangnya sosialisasi dari pemerintah kelurahan dalam memberikan proses penyadaran kepada masyarakat bahwa pentingnya partisipasi masyarakat dalam membangun budaya gotong royong. Budaya gotong royong di Kelurahan Sei Kera Hilir II kini mulai redup dan tenggelam ditengah kehidupan antar sesama, meskipun hanya beberapa masyarakat yang peka terhadap kegiatan gotong royong.

Manusia atau masyarakat memiliki peran penting partisipasi dalam melestarikan dan menjaga lingkungan. Setiap aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam kesehariannya akan menghasilkan sampah, penanggulangan dan juga tanggung jawab masyarakat terhadap pengelolaan sampah akan meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh sampah terhadap kualitas lingkungan hidup.

Menjaga kebersihan lingkungan hidup adalah hal yang wajib dilakukan masyarakat yang menempati suatu daerah, oleh karena itu partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar sangat dibutuhkan. Akan tetapi tentu tidak sedikit masyarakat yang tidak menyadarinya dan terkesan tidak peduli (Hamdani, 2017: 15).

Di era ini, perubahan sosial telah menyebabkan nilai-nilai lama yang selama ini menjadi pegangan dan acuan dalam relasi sosial berbasis pada semangat dan nilai-nilai gotong royong mulai menurun. Masuknya pengaruh budaya luar yang sangat individual saat ini, rasa kebersamaan dan gotong royong semakin memudar, kepekaan sosial mulai berkurang, tegur sapa dan bercengkrama serta kesadaran saling membantu sudah mulai luntur.

Penelitian ini dilakukan dalam lingkup kelurahan, yang dimaksud kelurahan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat (5) disebutkan bahwa kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja kecamatan. Penetapan kelurahan sebagai perangkat pemerintahan daerah di bawah kecamatan dimaksud dalam upaya meningkatkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat yang bercirikan perkotaan, sebagai dasar perkiraan dalam peraturan pemerintah ini adalah untuk mendorong memberdayakan masyarakat,

menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat. Kelurahan Sei Kera Hilir II adalah salah satu dari Sembilan kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan, dimana memiliki luas areal 44,4 Ha dan terdiri dari 15 lingkungan.

Berkaitan dengan masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peranan Pemerintah Dalam Program Gotong Royong Di Kelurahan Sei Kera Hilir II Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan pemerintah kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program gotong royong di Kelurahan Sei Kera Hilir II ?
2. Apa saja hambatan pemerintah kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program gotong royong di Kelurahan Sei Kera Hilir II ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah:

1. Untuk mengetahui peranan pemerintah kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program gotong royong di Kelurahan Sei Kera Hilir II Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan pemerintah kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program gotong royong di Kelurahan Sei Kera Hilir II Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Berikut Manfaat penelitian yang diharapkan oleh penulis yaitu:

1. Manfaat Akademis, diharapkan dapat sebagai syarat akhir untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu (S1), dan menjadi bahan masukan secara langsung bagian perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area khususnya mengenai Peran Pemerintah Kelurahan dalam meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam program gotong royong di Kelurahan Sei Kera Hilir II.
2. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti maupun para pembacanya dan dapat memberi masukan terhadap Pemerintah Kelurahan dalam Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam program gotong royong di Kelurahan Sei Kera Hilir II.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Definisi Peranan**

Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal ini berarti ia menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisahkan dan saling bertentangan satu sama lain. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. Peranan lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses (Soekanto, 2002: 268-269).

Peranan didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan yang lain. Peranan-peranan dapat dilihat sebagai bagian dari struktur masyarakat sehingga struktur masyarakat dapat dilihat sebagai pola-pola peranan yang saling berhubungan.

Menurut Sulistyowati (2017;211) terkait suatu peran yang ada pada setiap orang dalam masyarakat penting yaitu :

1. Peranan tertentu harus dilakukan apabila ingin mempertahankan keberlangsungan struktur masyarakat
2. Peranan diletakkan pada seseorang yang dianggap mampu melaksanakannya



dan juga haruslah terlatih dan memiliki kemauan untuk melakukannya

3. Dalam lingkup masyarakat ada beberapa individu yang tidak melakukan perannya yang diharapkan oleh masyarakat karena dalam prosesnya memerlukan sebuah pengorbanan lebih banyak dalam mengesampingkan kepentingan pribadi
4. Apabila semua orang mampu dan sanggup melakukan perannya. Tidak memuat kemungkinan bahwasannya masyarakat tersebut dapat memberikan kesempatan yang merata
5. Masyarakat terlihat terpaksa telah membatasi kesempatan-kesempatan tersebut.

Sementara itu peranan menurut Horoepoetri, dkk (2003:45) mengatakan dimensi peran, diantaranya:

1. Peran sebagai kebijakan maksudnya adalah kebijakan yang baik untuk dilakukan
2. Peran sebagai strategi adalah peran dapat menjadi sebuah strategi untuk mendapatkan simpati juga dukungan dari masyarakat (*public support*)
3. Peran ialah alat penyelesaian sengketa. Peran dapat menjadi sebuah dalam untuk meminimalisir suatu konflik dengan usaha mengumpulkan pendapat serta opini yang ada. Perkiraan atas persepsi ini contohnya saling bertukar pikiran dan juga sudut pandang sehingga bisa mengurangi rasa ketidakpercayaan (*mistrust*) dan kerancuan (*biases*)
4. Peran sebagai terapi dimaksudkan sebagai sebuah upaya untuk mengobati permasalahan psikologi yang dialami oleh masyarakat, contohnya ketidakberdayaan (*sense of powerlessness*), tidak memiliki kepercayaan diri

dan juga perasaan bahwa mereka merupakan sesuatu yang tidak penting dalam suatu kelompok masyarakat.

Menurut Abu Ahmadi (1982) peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status, fungsi sosial. Peran ialah tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai dengan kedudukan dalam masyarakat ataupun organisasi tertentu (Sitorus, 2006:134). Peran dipengaruhi dengan suatu keadaan sosial dalam maupun luar lingkungan yang sifatnya tetap. Peran dalam suatu instansi didefinisikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan perannya diterapkan didalam kantor maupun lembaga yang didudukinya (Reza Syahputra, 2015:3-4).

Menurut Merton (2007:67) mendefinisikan peran itu merupakan sebuah tingkah laku yang dalam lingkungannya diharapkan oleh bagian masyarakat yang memiliki kedudukan pada suatu tertentu. *Role set* atau perangkat peran ialah suatu kelengkapan yang hubungannya didasarkan oleh orang yang memiliki kedudukan atas status tertentu.

Menurut Sihombing (Skripsi Antonius 2018: 8 STPMD "APMD") ada beberapa kriteria peran yang diharapkan dapat dilaksanakan yaitu:

1. Sebagai Fasilitator.

Fasilitator adalah seseorang yang membantu sekelompok orang memahami tujuan bersama dan membantu mereka membuat rencana guna mencapai tujuan tersebut tanpa mencapai tanpa mengambil posisi tertentu dalam berdiskusi serta dapat memecahkan masalah secara bersama-sama dan fasilitator bukanlah seseorang yang bertugas hanya memberikan pelatihan, bimbingan, nasehat atau

pendapat. Fasilitator juga bisa menjadi pengarah yang baik untuk permasalahan. Fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan pekerjaan serta memperlancar pelaksanaan dengan suatu usaha tertentu. Fasilitas ialah suatu bantuan yang berupa uang atau benda dalam mempermudah suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama

2. Sebagai Pelayanan Masyarakat.

Melayani masyarakat merupakan pilar utama dalam memberdayakan dan membantu masyarakat dalam menemukan kekuatan dirinya untuk bisa berkembang secara optimal

3. Sebagai Pendamping.

Sebagai pendamping Kesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) dapat memberikan kontribusi terhadap partai politik. Acuan kerja yang diterapkannya adalah Tutwuri Handayani (mengikuti dari belakang, tetapi memberikan peringatan bila akan terjadi penyimpangan). Sebagai pendamping tentu memiliki peran yang sangat menentukan keberhasilan program-program yang dijalankannya

4. Sebagai Mitra.

Konsep pemberdayaan yang menempatkan Kesbangpol sebagai subjek, maka Kesbangpol harus dianggap sebagai mitra

5. Sebagai Penyandang Dana.

Sebagai penyandang dana, Kesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) memberikan bantuan baik material maupun non material

David Berry dalam Wirotomo (1981:99-101) menyatakan bahwa peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan

kewajiban- kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Peranan didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan yang lain (Mutiawanthi, 2017 : 107).

Menurut Suhardono dalam Hendrik (2013: 461-462) menyatakan bahwa peran merupakan patokan yang memberikan batasan yang mesti apa oleh seseorang yang memiliki jabatan. Adapun indikator peran yang dimaksud yaitu:

1. Peran sebagai mobilisator.

Peran sebagai mobilisator yaitu sebagai pengarah atau penggerak untuk melakukan sesuatu yang memiliki keterkaitan dengan pembangunan untuk menuju kepentingan bersama

2. Peran sebagai motivator.

Sebagai perangsang, memberikan dorongan, atau menstimulus orang lain atau masyarakat, yang mana orang yang diberikan hal-hal seperti diatas akan menuruti atau melaksanakan apa yang telah dimotivasikan secara kritis rasional dan tanggungjawab

3. Peran sebagai regulator.

Peran sebagai regulator adalah pada umumnya memberikan arahan kepada masyarakat melalui regulasi atau aturan-aturan yang ditetapkan yang bersifat membina masyarakat sesuai dengan standar operasional yang berlaku.

## 2.2 Konsep Pemerintahan Kelurahan

Pemerintahan berasal dari kata perintah yang berarti menyuruh melakukan sesuatu. Istilah pemerintahan diartikan sebagai perbuatan dalam artian bahwa cara hal urusan dan sebagainya dalam memerintah secara etimologi, dapat diartikan sebagai tindakan yang terus menerus (*continue*) atau kebijaksanaan dengan menggunakan suatu rencana maupun akal (*rasio*) dan tata cara untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki (Utrecht,1986: 28). Sedangkan definisi lain mengartikan bahwa pemerintah adalah jawatan atau aparatur dalam susunan politik. Pemerintahan dalam arti sempit dipandang sebagai aktivitas memerintah yang dilakukan oleh pemerintah (eksekutif saja) dan jajarannya guna mencapai tujuan negara.

Menurut Suhady dalam W. Riawan Tjandra (2009: 197) pemerintah (*government*) ditinjau dari pengertiannya adalah *the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect.* Dalam bahasa Indonesia sebagai pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya. Pemerintahan dapat juga diartikan sebagai *the governing body of a nation, state, city*, yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara.

Pemerintahan dalam konsep pemerintah daerah, berbeda dengan pemerintah pusat yang dianggap mewakili Negara, pemerintahan daerah dianggap mewakili masyarakat karena daerah adalah masyarakat hukum yang tertentu batas-batasnya. Konsep pemerintah didefinisikan oleh Istianto adalah merupakan suatu bentuk organisasi dalam suatu Negara. Tujuan dari pemerintah dikatakan oleh Ateng Syafrudin bahwa pemerintahan harus bersikap mendidik dan memimpin yang di



perintah, ia harus serentak dijiwai oleh semangat yang diperintah, menjadi pendukung dari segala sesuatu yang diinginkan secara samar-samar oleh semua orang yang dilukiskan secara nyata dan dituangkan dalam kata-kata oleh orang-orang yang terbaik dan terbesar.

Pemerintah kelurahan adalah pemerintah yang membawahi pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawah kecamatan. Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas.

Pengertian kelurahan menurut undnag-undang Nomor 23 Tahun 2004 pada Pasal 229 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu kelurahan dibentuk dengan perda kabupaten/kota berpedoman pada peraturan pemerintah. Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat. Lurah diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pemerintahan kelurahan merupakan pelaksanaan pemerintahan yang dilaksanakan atau dilakukan oleh pemerintah kelurahan.

Secara terperinci tugas dan pokok dari aparat pemerintah kelurahan adalah sebagai berikut :

a) Lurah

Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah mempunyai tugas memimpin kecamatan dalam membina, mengoordinasikan dan melaksanakan kewenangan

pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dibidang pemerintahan pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban, pelayanan masyarakat serta pembinaan secretariat kelurahan

b) Sekretaris

Secretariat dipimpin oleh seorang sekretaris kelurahan, mempunyai tugas membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan di bidang ketatausahaan, kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, keuangan, serta memberikan pelayanan teknis dan administrative kepada semua unsur dalam lingkup kelurahan

c) Kepala Seksi Pemerintahan

Seksi pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas membantu lurah dalam membina, mengoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang pemerintahan

d) Kepala Seksi Pembangunan

Seksi pembangunan dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas membantu lurah dalam membina, mengoordinasikan dan melaksanakan tugas dibidang pembangunan

e) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi ketentraman dan ketertiban dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas membantu lurah dalam membina, mengoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban.

Menurut Pasal 1 Ayat 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 73 Tahun 2005 mengemukakan bahwa kelurahan adalah wilayah kerja kecamatan. Dalam pasal 3 peraturan pemerintahan republic Indonesia no 7 tahun 2005

mengemukakan bahwa.

1. Kelurahan merupakan perangkat daerah kabupaten / kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan;
2. Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah tanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat;
3. Lurah diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Camat dari pegawainegeri Sipil;
4. Syarat-syarat Lurah meliputi ;
  - a. Pangkat / golongan minimal penata (III/C) ;
  - b. Masa kerja minimal 10 tahun ;

Kemampuan teknis di bidang administrasi pemerintahan dan memahami keadaan sosial budaya masyarakat setempat kelurahan sebagai kesatuan wilayah terkecil didalam wilayah kecamatan di daerah kabupaten/kota, dapat berfungsi sebagai unit kerja pelayanan pada masyarakat berdasarkan pelimpahan sebagian kewenangan dari camat kepada lurah sehingga dalam tugas pokok dan fungsinya, pemerintah kelurahan menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dalam ruang lingkup kelurahan sesuai batas-batas kewenangan yang dilimpahkan camat. Pemerintahan kelurahan perlu memiliki kemandirian dan akuntabilitas publik yang cukup memadai, dalam interaksinya yang bersifat langsung dengan masyarakat di wilayah kerjanya. Sebagai unit pelaksana pemerintahan yang terendah di bawah kecamatan, jenis-jenis pelayanan yang dapat di koordinasikan penyelenggaraannya oleh lurah adalah beragam dengan kriteria yang mencakup pelayanan kebutuhan dasar masyarakat seperti pelayanan pembuatan KTP, pencatatan akta tanah, penyuluhan masyarakat.

Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah camat tetapi tidak memiliki hak untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Sesuai dengan nomor 73 tahun 2005, kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kecamatan. Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan, pembentukan kelurahan harus sekurang-kurangnya memenuhi syarat:

1. Jumlah penduduk
2. Luas wilayah
3. Bagian wilayah kerja
4. Sarana dan prasarana pemerintahan.

Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung. Pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan kelurahan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota dengan berpedoman pada peraturan menteri.

Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kelurahan melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota. Urusan pemerintahan disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas. Pelimpahan urusan pemerintahan, disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil. Pelimpahan urusan pemerintahan ditetapkan dalam peraturan walikota dengan berpedoman pada peraturan menteri. Dalam pelaksanaan

tugas, lurah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan
- b. Pemberdayaan masyarakat
- c. Pelayanan masyarakat
- d. Penyelenggaraan masyarakat dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana
- e. Fasilitas pelayanan umum, dan pembinaan lembaga kemasyarakatan. Dalam menyelenggarakan pemerintahan kelurahan, lurah dibantu perangkat kelurahan.

Perangkat kelurahan terdiri dari Sekretaris Kelurahan dan seksi serta jabatan fungsional. Dalam melaksanakan tugasnya, diisi dari pegawai negeri sipil yang diangkat oleh sekretaris daerah kabupaten/kota atas usul camat. Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja.

### 2.3 Pengertian Partisipasi

Menurut Chabib Soleh (2014 : 111) “partisipasi dimaknai sebagai ketertiban seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan”. Ketertiban tersebut umumnya didorong oleh suatu kesadaran dan kesukarelaan untuk ikut memperbaiki keadaan.

Menurut Verhangen dalam Totok Mardikanto (2003 : 167) : partisipasi merupakan bentuk keikutsertaan atau keterlibatan seseorang (individu atau warga masyarakat) dalam suatu kegiatan tertentu. Keikutsertaan atau keterlibatan yang dimaksud disini bukanlah bersifat pasif tetapi secara aktif ditunjukkan oleh yang bersangkutan. Partisipasi akan lebih tepat diartikan sebagai keikutsertaan seseorang di dalam suatu kelompok sosial untuk mengambil bagian dalam kegiatan masyarakatnya, diluar pekerjaan atau profesinya sendiri.



Menurut Wazir (1999 : 29) “Partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu”. Berdasarkan beberapa pendapat diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa partisipasi adalah keterlibatan seseorang individu maupun kelompok dalam setiap kegiatan dimasyarakat untuk mencapai tujuan tertentu.

### **2.3.1 Tahap-Tahap Partisipasi**

Secara singkat partisipasi menurut Cohen dan Uphoff dalam Siti Irene Astuti D. (2009:40) dojelaskan dalam tahap-tahap sebagai berikut:

1. Pengambilan keputusan, yaitu penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kesepakatan dari berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Pertama partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kata sepakat tentang berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi dalam hal pengambilan keputusan ini sangat penting, karena masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan oreantasi pembangunan. Wujud dari partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini bermacam-macam, seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini merupakan suatu proses pemilihan alternative berdasarkan pertimbangan yang menyeluruh dan rasional
2. Pelaksanaan, yaitu penggerakan sumber daya dan dana. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan. Dalam

pelaksanaan program, sangat dibutuhkan ketertiban berbagai unsur, khususnya pemerintah dalam kedudukannya sebagai focus atau sumber utama pembangunan.

3. Pengambilan manfaat, yaitu partisipasi berkaitan dengan kualitas hasil pelaksanaan program yang bisa di capai. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa di capai. Dari segi kualitas, keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan output, sedangkan dari segi kualitas dapat dilihat seberapa besar persentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
4. Evaluasi, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan mengetahui bagaimana pelaksanaan program berjalan. Keempat, partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah selesai dengan rencana yang ditetapkan atau ada penyimpangan.

Berdasarkan tahap-tahap partisipasi diatas dapat dirumuskan pengertian partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan seseorang dalam pembangunan (secara sadar), baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan menerima hasil-hasil pengembangan (Nugraheni, 2011).

### **2.3.1 Tingkat Kesukarelaan Partisipasi**

Dusseldorp (dalam mardikanto, 2003:23) membedakan adanya beberapa jenjang kesukarelaan dalam aktifitas partisipasi, yaitu sebagai berikut:

1. Partisipasi spontan, yaitu peran serta yang tumbuh karena motivasi intrinsik berupa pemahaman, penghayatan, dan keyakinannya sendiri

2. Partisipasi terinduksi, yaitu peran serta yang tumbuh karena terinduksi oleh adanya motivasi ekstrinsik (berupa bujukan, pengaruh, dan dorongan dari luar) meskipun yang bersangkutan tetap memiliki kebebasan penuh untuk berpartisipasi
3. Partisipasi tertekan oleh kebiasaan, yaitu peran serta yang tumbuh karena adanya tekanan yang dirasakan sebagaimana layaknya warga masyarakat pada umumnya, atau peran serta yang dilakukan untuk mematuhi kebiasaan, nilai-nilai, atau norma yang dianut oleh masyarakat setempat (jika tidak berperan serta khawatir akan tersisi atau dikucilkan masyarakatnya)
4. Partisipasi tertekan oleh alasan sosial ekonomi, yaitu peran serta yang dilakukan karena takut akan kehilangan status sosial atau menderita kerugian/tidak memperoleh bagian manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan
5. Partisipasi tertekan oleh peraturan, yaitu peran serta yang dilakukan karena takut menerima hukuman dari peraturan/ketentuan-ketentuan yang sudah diberlakukan.

### 2.3.2 Upaya Menumbuhkan Partisipasi

Usaha menggerakkan partisipasi merupakan suatu keharusan dalam pelaksanaan sebuah program. Menurut Kusnaedi (dalam Fandayani, 2010:20), partisipasi dapat dibangkitkan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1. Menggunakan prinsip pertukaran dasar, yaitu pendekatan timbal balik manfaat yang diterima langsung oleh masyarakat
2. Memberikan bimbingan dan kepercayaan pada masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan dengan memperhatikan kondisi sosial sehingga motivasi masyarakat semakin kuat untuk berpartisipasi

3. Kegiatan atau program yang dilakukan harus bersifat dan berfungsi sebagai stimulant yang mampu meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat
4. Rancangan program kegiatan harus sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat sehingga memudahkan masyarakat untuk melibatkan diri
5. Menyelaraskan program-program yang akan dilaksanakan dengan aspirasi yang berkembang dimasyarakat
6. Melibatkan masyarakat dalam membuat suatu rencana dan keputusan.

#### 2.4 Definisi Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata “masyarakat” sendiri berasal dari kata bahasa arab, *musyarak*. Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antara entitas-entitas. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang independen (saling ketergantungan satu sama lain).

Semua warga masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan ini akan tercipta apabila manusia melakukan hubungan, Mach Iver dan Page (dalam Soerjono Soekanto 2006:22), memaparkan bahwa masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerja sama antarberbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan- kebiasaan manusia.

Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang

yang hidup bersama dalam suatu komunitas yang teratur. Masyarakat sering diorganisasikan berdasarkan cara utamanya dalam pencaharian. Pakar ilmu sosial mengidentifikasi ada : masyarakat pemburu, masyarakat pastoral nomadis, masyarakat bercocok tanam, dan masyarakat agricultural intensif, yang juga disebut masyarakat peradaban sebagian pakar menganggap masyarakat industri dan pasca industri sebagai kelompok masyarakat agrikultural tradisional.

## **2.5 Definisi Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat menurut (Isbandi : 2007 : 27) adalah sebuah ikut serta yang dilakukan oleh masyarakat dalam sebuah proses identifikasi masalah dan potensi yang masyarakat miliki seperti dalam hal pemilihan umum, pengambilan keputusan mengenai sebuah solusi alternatif untuk menangani persoalan tertentu, pelaksanaan usaha-usaha dalam mengatasi permasalahan, dan juga keterlibatan masyarakat dalam mengevaluasi terhadap perubahan yang terjadi.

### **2.5.1 Bentuk partisipasi masyarakat**

Partisipasi masyarakat dapat dibedakan dalam berbagai bentuk. Partisipasi menurut Effendi (dalam Siti Irene A.D.2011) terbagi atas partisipasi vertical dan partisipasi horizontal. Disebut partisipasi vertikal karena terjadi dalam bentuk kondisi tertentu, dimana masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain dalam hubungan dimana masyarakat berbeda sebagai status bawahan, pengikut, atau klien. Adapun dalam partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya.

Partisipasi semacam ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri. Lebih konkrit dijelaskan dalam buku “partisipasi masyarakat” yang diterbitkan oleh Depdiknas (2001:201),



bahwa bentuk partisipasi masyarakat antara lain:

1. Pengawasan terhadap masyarakat
2. Tenaga, yaitu sebagai sumber atau tenaga sukarela untuk membantu mensukseskan kegiatan pelaksanaan, baik secara individu maupun gotong royong
3. Pemikiran, yaitu memberikan masukan berupa pendapat dan pemikiran dalam rangka menanggulangi masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam kegiatan.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam dibedakan menjadi empat jenis, yaitu bentuk finansial, sarana/prasarana, tenaga/keahlian, dan moril. Partisipasi dalam bentuk finansial misalnya partisipasi pemberian sumbangan dan pinjaman. Partisipasi dalam bentuk sarana/prasarana misalnya bantuan alat untuk membersihkan lingkungan seperti cangkul, dan bantuan ruangan untuk rapat. Bentuk tenaga dan keahlian misalnya partisipasi tenaga, baik tenaga kependidikan, tenaga ahli, dan keterampilan dalam membantu melaksanakan kegiatan dilingkungan masyarakat. Bentuk moril misalnya partisipasi buah pikiran, pendapat/ide, saran, pertimbangan, nasehat, dukungan moril, dan lain sebagainya yang berkenaan dengan penentuan kebijaksanaan atau dalam pengambilan suatu keputusan.

## 2.6 Pengetian Gotong Royong

Kegiatan gotong royong mendukung sebuah rasa solidaritas dari seluruh masyarakat. Solidaritas yang muncul dalam setiap kelompok masyarakat disebabkan adanya beberapa persamaan, seperti persamaan kebutuhan, keturunan dan tempat tinggal. Hubungan antar individu atau kelompok yang mendalam berdasarkan perasaan akan menimbulkan sebuah rasa solidaritas dalam sebuah

masyarakat. Gotong royong dilakukan masyarakat dalam kehidupannya memiliki peranan dan manfaat yang sangat penting. Pembangunan akan cepat terlaksana apabila masyarakat didalamnya bergotong royong dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan tersebut. Mewujudkan suatu kegiatan gotong royong yang berjalan dengan baik dalam masyarakat tidaklah mudah mengingat saat ini sudah mulai tumbuh sikap egois dan perilaku konsumtif. Gotong royong merupakan salah satu budaya luhur bangsa Indonesia. Gotong royong mengandung nilai-nilai positif yang tercermin melalui kerjasama, mengutamakan rasa kebersamaan serta persatuan dan kesatuan dalam masyarakat.

Perilaku gotong royong mencerminkan nilai persatuan yang mengandung nilai-nilai Pancasila khususnya Pancasila sila ke-3 yang berbunyi “Persatuan Indonesia”. Gotong Royong merupakan azas terpenting bagi terbentuknya keteraturan hidup bagi masyarakat Indonesia.

Berdasarkan Pada Pasal 10 Bab 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 Tentang Kegiatan Dalam Gotong Royong meliputi :

1. Pembangunan dan pemeliharaan prasarana lingkungan (jalan lingkungan, jembatan desa, drainase, prasarana persampahan, jamban, dan prasarana lingkungan lainnya)
2. Pembangunan dan pemeliharaan prasarana air bersih
3. Pembersihan dan penyehatan lingkungan pemukiman
4. Penyuluhan tentang kesehatan lingkungan
5. Konservasi, rehabilitasi, dan reboisasi lahan kritis

6. Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang lingkungan.

Menurut Sayidiman Suryohadiprojo (2016:8) “menyatakan bahwa gotong royong adalah kehidupan yang didasarkan kebersamaan. Kebersamaan berarti bahwa ada pengakuan tentang peran perseorangan atau individu manusia yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha kuasa”.

Menurut Kusnaedi (2006:16) “gotong royong merupakan sikap positive yang mendukung dalam perkembangan desa dan juga perlu dipertahankan sebagai suatu perwujudan kebiasaan melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama”.

Gotong royong merupakan bagian dari etika sosial dan budaya yang bertolak dari rasa kemanusiaan. Menurut Tap MPR No VI/MPR/2001 “etika sosial dan budaya yang bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan sikap jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai, saling menolong, saling mencintai diantara sesama manusia dan warga bangsa”. Etika ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kembali kehidupan berbangsa dan berbudaya tinggi dengan menggugah, menghargai dan mengembangkan budaya nasional yang bersumber dari budaya daerah (termasuk didalamnya adalah budaya gotong royong) agar mampu melaksanakan adaptasi, interaksi dengan bangsa lain dengan tindakan proaktif sejalan dengan tuntutan globalisasi (Fernanda, 2003:16).

Berdasarkan pengertian diatas, maka penulis bisa mengambil kesimpulan bahwa gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela sehingga kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah dan ringan karena seseorang menyadari bahwa dalam kehidupan saling membutuhkan.

### **2.6.1 Jenis-Jenis Gotong Royong**

Sistem tolong menolong dalam kehidupan masyarakat kelurahan yang didalam bahasa Indonesia disebut sistem gotong royong, menunjukkan perbedaan-perbedaan mengenai sifat (rela atau kurang rela) dalam hubungannya dengan beberapa macam lapangan aktivitas kegiatan sosial. Sehubungan dengan hal tersebut, Koentjaraningrat (2012:153) dapat dibedakan adanya beberapa macam tolong-menolong, ialah :

1. Tolong-menolong dalam aktivitas pertanian
2. Tolong-menolong dalam aktivitas-aktivitas sekitar rumah tangga
3. Tolong-menolong dalam aktivitas persiapan pesta dan upacara
4. Tolong-menolong dalam peristiwa kecelakaan, bencana, dan kematian.

### **2.6.2 Sistem Kerja Gotong Royong Dalam Masyarakat**

Soekanto (2006:26) menerangkan bahwa kerja sama merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu orang. Kerja sama bisa bermacam-macam bentuknya, namun semua kegiatan diarahkan untuk mewujudkan tujuan bersama. Sesuai dengan kegiatannya, maka kegiatan yang terwujud di tentukan oleh suatu pola yang disepakati secara bersama-sama. Misalnya kerja sama dibidang pertanian, kerja sama ini tentunya dilakukan oleh orang-orang yang berada dilingkungan sector pertanian yang sama-sama memiliki tujuan yang sama.

### **2.6.3 Karakteristik Gotong Royong**

Gotong royong sudah tidak dapat dipungkiri lagi sebagai ciri khas bangsa Indonesia yang turun menurun sehingga keberadaannya harus dipertahankan. Pola seperti ini merupakan bentuk nyata dari solidaritas mekanik yang terdapat dalam

kehidupan masyarakat sehingga setiap warga yang terlibat didalamnya memiliki hak untuk dibantu dan berkewajiban untuk membantu, dengan kata lain didalamnya terdapat azas timbal balik.

Menurut Puskur (2009:14), terdapat beberapa karakteristik perilaku gotong royong dalam masyarakat, yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai sifat dasar bangsa Indonesia yang menjadi unggulan bangsa dan tidak dimiliki bangsa lain
2. Terdapat rasa kebersamaan dalam setiap pekerjaan yang dilakukan
3. Memiliki nilai yang luhur dalam kehidupan
4. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, karena didalam kegiatan gotong royong setiap pekerjaan dilakukan secara bersama-sama tanpa memandang kedudukan seseorang, tetapi memandang keterlibatannya dalam suatu proses pekerjaan
5. Mengandung arti saling membantu yang dilakukan demi kebahagiaan dan kerukunan hidup masyarakat
6. Suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan sifatnya sukarela tanpa mengharap imbalan apapun dengan tujuan agar pekerjaan atau kegiatan akan berjalan dengan mudah, lancar dan ringan.

## 2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelusuran terhadap studi karya terdahulu yang topiknya berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Adapun penelitian terdahulunya adalah sebagai berikut :



**Tabel 1.**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Judul dan Nama Penelitian	Metode	Hasil	Perbedaan dan persamaan	sumber
1	2	3	4	5	6
1.	Partisipasi masyarakat dalam mempertahankan budaya gotong royong di desa serakapi untuk meningkatkan pembangunan (studi kasus desa serakapi kecamatan woja kabupaten dompu) Oleh Indra (2021)	Kualitatif	Tingkat partisipasi masyarakat dalam mempertahankan budaya gotong royong untuk meningkatkan pembangunan desa serakapi dapat dilihat pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan yang tergolong baik dalam partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan serta pemeliharaan.	Perbedaan penelitian terdahulu terletak pada lokasi penelitian yang di mana tempat lokasi tersebut di Desa Serakapi Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, sedangkan penelitian yang sekarang ini berlokasi di Kelurahan Sei Kera Hilir II Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah sama-sama melakukan penelitian tentang meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program gotong royong dengan teknik pengumpulan data melakukan wawancara dan observasi.	Skripsi
2.	partisipasi warga dalam gotong royong melalui komunitas pengelola sampah rukun santoso” oleh Nurma Apriyani, Moh Muchtarom & Hassan	Kualitatif	Masyarakat partisipasi dalam gotong royong melalui pengelolaan sampah komunitas rukun santoso cukup baik meskipun tidak semua masyarakat berpartisipasi	Perbedaan penelitian terletak pada lokasi penelitian dan menggunakan komunitas dalam pengelolaan sampah Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah pada jenis penelitian	Jurnal

1	2	3	4	5	6
	Suryono (2017)			yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif	
3.	“Partisipasi Masyarakat Terhadap Kebersihan Lingkungan Di Kelurahan Sei Kera Hilir II Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan” oleh Feby Agustina & Mbina Pinem (2022)	Kualitatif	partisipasi masyarakat di kelurahan tersebut mempengaruhi usia, jenis kelamin, dan juga status. Masyarakat yang berusia 18- 60 thn memiliki partisipasi sedang (63%) masyarakat yang memiliki jenis kelamin dan perempuan sama-sama memiliki partisipasi sedang (63%) pendidikan masuk dalam kategori sedang (63%) namun masyarakat dengan tingkat pendidikan terakhir yang tinggi memiliki partisipasi yang lebih tinggi terhadap kebersihan lingkungan masuk dalam katagori sedang.	Perbedaan penelitian terletak pada lokasi penelitian dan persamaan penelitian terdahulu adalah jenis penelitian yaitu menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif.	
4	“Partisipasi masyarakat dalam kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat (BBGRM) Dikelurahan sampang kecamatan gajahmungkur kota semarang” oleh eva nur hidayah (2020)	Kualitatif	Partisipasi masyarakat dalam kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat (BBGRM) dikelurahan sampangan kecamatan gajahmungkir sudah berhasil terlaksanakan	Perbedaan terletak pada lokasi penelitian di Kelurahan Sampang Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, persamaan dalam penelitian ini ialah menggunakan metode kualitatif dan peneliti menggunakan teknik pengumpulan data, wawancara dan observasi.	Skripsi

1	2	3	4	5	6
5.	“Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (Pdpgr) Di Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat” oleh Iyut Indrajaya (2021)	Kualitatif	Pengaruh kesejahteraan terhadap partisipasi masyarakat dalam Program PDPGR dalam pengentasan kemiskinan di Kecamatan Brang Ene telah memberikan hasil yang nyata dalam kehidupan masyarakat, hal ini di lihat dari peningkatan kualitas hidup baik di bidang ekonomi, kesehatan maupun jaminan sosial dari PDPGR. Selain itu tumbuhnya rasa ketercukupan masyarakat terhadap bantuan yang di terima melalui kegiatan-kegiatan yang di canangkan oleh PDPGR yang telah dilaksanakan sejak tahun 2016.	Perbedaan terletak pada judul besar, lokasi penelitian juga berbeda yang dimana lokasi tersebut di Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah sama-sama penelitian deskriptif kualitatif	Skripsi

## 2.8 Kerangka berpikir

Penulis menguraikan kerangka berpikir merupakan konsep untuk melakukan penelitian yang memaparkan bagaimana penelitian dilakukan diawal, hingga pelaksanaan proses akhir dalam penelitian agar hasilnya tidak bertolak belakang dengan apa yang diamati di lapangan. Peneliti membuat kerangka berfikir yaitu berkaitan dengan teori-teori yang berkaitan dan berkesinambungan. Kerangka pemikiran dianggap relevan agar dapat menjawab permasalahan yang ada dirumusan masalah penulis.

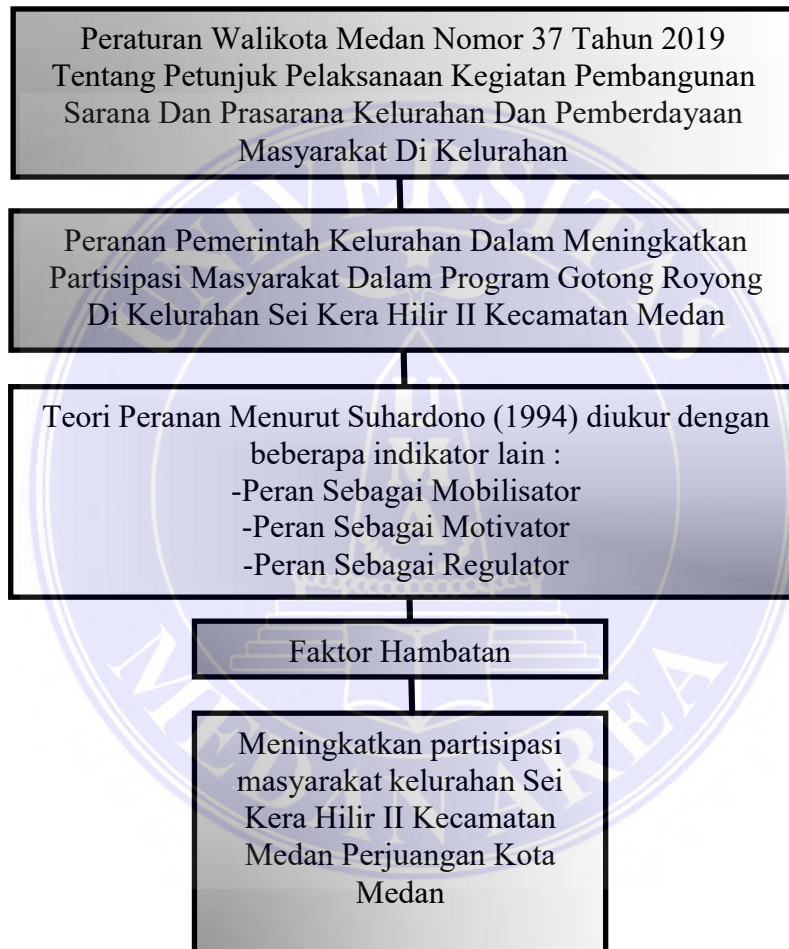
Kerangka Berpikir merupakan sebuah konsep untuk melakukan penelitian, dengan adanya kerangka berpikir maka penelitian yang dilakukan tidak bertolak belakang dengan judul penelitian. Kerangka pemikiran adalah analisis secara teoretis mengenai hubungan antara variabel-variabel yang akan diteliti. Oleh karena itu, kerangka berpikir adalah sebuah konsep untuk melakukan suatu penelitian. (Iskandar, 2010: 173).

Kerangka berfikir ini memuat 4 tabel yang dimulai dari judul penelitian yaitu peran pemerintah kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program gotong royong di kelurahan Sei Kera Hilir II Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan, kemudian peneliti menggunakan teori John M. Inancevich Robert dan Michael T. Matteson yang mencakup lima(3) indikator antara lain peran yang diharapkan, peran yang dipersepsikan, peran yang dijalankan. Setelah menggunakan teori tersebut yang dianggap relevan peneliti mendapatkan hasil bahwasanya peran pemerintah kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat sudah baik karena ada faktor yang dimiliki oleh pemerintah kelurahan tersebut. Dalam menerapkan suatu peran tidak akan terlepas dari faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi peran pemerintah tersebut. Maka perlu peneliti untuk menganalisis secara eksplisit apa saja faktor penghambat pemerintah kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program gotong royong di kelurahan Sei Kera Hilir II.

Dan setelah semuanya sudah ketahu, maka peneliti dapat mengetahui bagaimana hasil dari peran dan apa saja faktor penghambat pemerintah kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan adanya kerangka berpikir, maka hasil dari penelitian yang dilakukan di lapangan tidak bertolak belakang

dengan judul penelitian. Dalam penelitian ini, penulis meneliti tentang peran pemerintah kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program gotong royong di kelurahan sei kera hilir II kecamatan medan perjuangan kota medan. Supaya konsep tersebut dapat dijelaskan, maka konsep yang dapat digambarkan akan disusun dalam struktur sebagai berikut:

**Gambar 1. Kerangka Berpikir**





## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan melalui metode penelitian berharap menjawab masalah-masalah yang sedang diteliti. Berdasarkan pendekatan dan jenis data yang digunakan, penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif sehingga akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata. Sementara itu, metode kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna fenomena tersebut. Jenis penelitian tersebut digunakan untuk mengetahui peran pemerintah kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program gotong royong di Kelurahan Sei Kera Hilir II Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan.

Menurut Bogdan dan Taylor dalam Meleong (2002 : 3) menyebutkan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Menurut Wiliamas dalam Moleong (2007 : 5) menulis bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara ilmiah. Sesuai dengan teori diatas, bahwa penelitian ini juga merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan data menuturkan data, situasi maupun fenomen-fenomena sosial yang terjadi.

Maka dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui bagaimana peran pemerintah kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program

gotong royong di Kelurahan Sei Kera Hilir II Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan.

### 3.2 Lokasi Dan Jadwal Penelitian

#### 3.2.1 Lokasi

Lokasi penelitian adalah tempat dimana diambilnya beberapa sampel dan data penelitian yang diperlukan untuk hasil dari penelitian. Peneliti mengambil lokasi penelitian di kantor lurah dan lingkungan sei kera hilir II.

#### 3.2.2 Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian yang dilakukan peneliti ialah sejak bulan Oktober 2022 s/d maret 2023.

**Tabel 2. Jadwal Penelitian**

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan						
		Okt 22	Feb 23	Feb 23	Mei 23	Juni 23	agust 23	Sept 23
1.	Pengajuan Judul	■						
2.	Observasi Awal	■						
3.	Penyusunan Proposal	■						
4.	Bimbingan dan Perbaikan Proposal	■						
5.	Seminar Proposal		■					
6.	Revisi Proposal			■				
7.	Observasi Lapangan dan Wawancara				■			
8.	Penyusunan Bab IV – V					■		
9.	Seminar Hasil						■	
10.	Bimbingan Dan Perbaikan						■	
11.	Sidang Skripsi							■

*Sumber : Diolah oleh peneliti 2022*

### 3.3 Informan Penelitian

Informan penelitian ialah orang yang ditunjuk dan digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data dan informasi mengenai situasi dan juga kondisi yang berkaitan dengan penelitian selama penelitian berlangsung. Informan penelitian hendaklah orang yang benar-benar paham tentang masalah-masalah yang akan diteliti pada penelitian ini. (Moleong,2015:163).

Peneliti menjabarkan 3 (tiga) bagian informan (Narasumber) untuk memberikan informasi seputar topik permasalahan yang peneliti teliti, yakni informasi kunci, informan utama, dan informasi tambahan.

Menurut Hendarsono dalam Suyanto (2005:171-172) mengatakan informan penelitian terdiri dari 3 macam yaitu:

1. Informan Kunci.

Informan kunci merupakan pihak yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun informan kunci yaitu Lurah Bapak Anto Syahputra,SE

2. Informan Utama.

Informan Utama yaitu pihak yang terlibat secara langsung di dalam interaksi sosial yang diteliti. Adapun informan utama yaitu Sekretaris Lurah Bapak Martunas Simarmarta,SH dan Kasi Pembangunan yaitu Ibu Karmauli Sinaga

3. Informan Tambahan.

Informan tambahan yaitu pihak yang dapat memberikan informasi walaupun secara tidak langsung terhadap interaksi sosial yang diteliti (Sondak dan Taroreh, Dkk. 2019: 674), Adapun informan tambahannya yaitu Ibu Fiza Syahkri, Ibu Fitri, Ibu Ira selaku masyarakat Sei Kera Hilir II.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menetapkan informan dalam penelitian sebagai berikut:

**Tabel 3. Informan Penelitian**

No	Uraian	Jumlah (orang)	Keterangan
1	Lurah Anto Syahputra	1	Informan Kunci
2	Sekretaris Lurah Martunas Simarmarta, SH	1	Informan Utama
3	Kasi Pembangunan Karmauli, Sinaga	1	Informan Utama
5	Masyarakat 1. Fiza Sakri 2. Fitri 3. Ira	3	Informan Tambahan
	Jumlah	7	

*Sumber : Diolah oleh peneliti 2022*

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Merupakan suatu tahapan strategi dalam suatu penelitian yang tujuannya untuk mendapatkan sebuah data. (Ditha Prasanti,2018-17). Penulis menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu:

Pada penelitian ini penulis menggunakan 3 teknik pengumpulan data diantaranya :

#### 1. Teknik Observasi

S. Margono mengatakan bahwa Observasi didefinisikan sebagai “pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian”. Maka observasi disini ialah salah satu tahapan yang digunakan selama penelitian untuk mendapatkan data yang akurat yang bersifat representative karena pada tahap ini penulis datang langsung ketempat penelitian

untuk terjun langsung mengamati dan juga menyimpulkan segala kegiatan sosial yang ada pada tempat penelitian.

## 2. Teknik Wawancara

Interview ialah “sebuah percakapan antara peneliti (seseorang yang ingin mendapatkan informasi terkait dengan subjek penelitian) dan informan (seseorang yang sekiranya yang mempunyai informasi terhadap subjek)”. Wawancara dalam prosesnya adalah komunikasi dua arah dengan mengadakan tanya jawab dengan informan yang sudah dipilih untuk mendapatkan keterangan atas data yang diteliti.

Peneliti bertindak sebagai pewawancara yang memberikan pertanyaan kepada informan yang dituju untuk mendapatkan data terkait dengan focus penelitian. Selanjutnya informan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan yang nantinya digunakan sebagai data penelitian. Informan memiliki hak untuk tidak menjawab pertanyaan pewawancara apabila ia merasa bahwa pertanyaan tersebut mengandung informasi yang seharusnya tidak dipublikasikan.

Teknik wawancara pada penelitian ini adalah wawancara terstruktur yang mana selama prosesnya dilakukan dengan terencana. Peneliti lebih dulu mempersiapkan panduan berupa interview guide sebagai acuan selama proses wawancara berlangsung.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi juga digunakan sebagai pengumpulan data dalam penelitian ini. Menurut S, Margono “Dokumenter adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum, dan lain-lainyang berhubungan dengan



masalah penelitian disebut dengan teknik documenter atau studi documenter”. Dokumen dalam penelitian ini bersumber dari dokumen-dokumen ataupun arsiparsip yang terdapat pada Kelurahan Sei Kera Hilir II.

### 3.5 Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan tahapan dalam menemukan data dan menyusun secara sistematis data yang sudah didapat dari hasil wawancara, hasil terjunlapanan, dan dokumentasi serta menarik kesimpulan sehingga mudah di pahami. Data induktif dipilih menjadi teknik analisis dalam penelitian ini. Analisis data induktif merupakan analisis berdasarkan penarikan kesimpulan yang berasal dari fakta-fakta dan ditarik kesimpulan secara umum. Tahapan dalam analisis ini adalah:

#### 1. Pengumpulan Data (*Data Collections*)

Teknik analisis pertama peneliti yaitu mengumpulkan informasi objek yang akan diteliti. Baik yang di dengar atau di lihat. Untuk Teknik ini pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

#### 2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan kegiatan yang memuat rangkuman, memilih tema, membuat kategori dan pola-pola tertentu yang kemudian akan memberikan makna. Mereduksi data bertujuan untuk mempertajam, memilih, memfokuskan, dan Menyusun data untuk kearah penarikan kesimpulan.

#### 3. Display Data (*Data Display*)

Kegiatan ini berbentuk penyajian data setelah dilakukan nya reduksi data. Dalam hal ini dilakukan dalam bentuk bagan, hubungan antar kategori, ikhtisar yang tujuannya agar mudah dipahami oleh pembaca.

#### 4. Kesimpulan (*Conclution*)

Pada penelitian kualitatif, kesimpulan hasil penelitian harus dapat memberikan jawaban daripada rumusan masalah yang diambil. Dan kesimpulan harus didukung oleh bukti–bukti yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.



## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Kelurahan Sei Kera Hilir II Kecamatan Medan Perjuangan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peran Pemerintah Kelurahan Sei Kera Hilir II terhadap pelaksanaan kegiatan gotong royong dan posyandu sudah berjalan dengan baik dalam memberikan arahan serta motivasi untuk melaksanakan kegiatan gotong royong. Hal ini dilihat dari beberapa indikator peran sebagai mobilisator, motivator serta regulator, yang mana Pemerintah Kelurahan Sei Kera Hilir II telah melakukan pengarahannya yang jelas kepada masyarakat mengenai kegiatan gotong royong dan posyandu, melakukan dorongan kepada masyarakat, dan melaksanakan kegiatan gotong royong dan posyandu sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
2. Faktor penghambat peran pemerintah Kelurahan Sei Kera Hilir II yaitu masih rendahnya kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong dan posyandu yang dilakukan. Diantaranya ada banyak alasan, tidak peduli dan ketidaktahuan informasi yang diberikan, kemudian juga anak muda dan ibu-ibu yang memiliki anak kecil sangat sedikit yang ikut serta karena bagi mereka bergotong royong dan posyandu itu tidak penting.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saranan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kelurahan Sei Kera Hilir II disarankan melakukan berbagai upaya pendekatan dengan masyarakat terutama anak muda agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan ormas dan pemerintah kelurahan seperti bergotong royong, dan kegiatan sosial lainnya. Selain itu pemerintah kelurahan sei kera hilir II perlu mempererat hubungan dengan masyarakat untuk menciptakan sebuah kesepakatan anatar masyarakat dengan pemerintah kelurahan sei kera Hilir II , hal ini juga merupakan suatu sarana untuk menciptakan sebuah solusi permasalahan masyarakat mengenai partisipasinya terhadap kegiatan gotong royong.
2. Kepala lingkungan disarankan rutin melakukan himabuan dan ajakan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam gotong royong di kelurahan sei kera hilir II, agar rasa kepedulian masyarakat terhadap kegiatan gotong royong ini tidak hilang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Cohel dan Uphoff, Siti Irene Astuti D. 2009. Tahap-Tahap dalam Partisipasi Masyarakat. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dusseldrop, Mardikanto. 2003. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Sosial. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Effendi, Siti Irene A.D 2011. Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Eva nur hidayah (2020). Partisipasi masyarakat dalam kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat (BBGRM) di kelurahan sampangan kecamatan gajahmungkur kota semarang.
- Feby Agustina, Mbina Pinem (2022). Partisipasi Masyarakat Terhadap Kebersihan Lingkungan Di Kelurahan Sei Kera Hilir II Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan. Jurnal Ilmu Sosial. Vol 11 No.3, ISSN 20850328.
- Fernanda. 2003. Sistem Gotong royong dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jakarta: Departemen pendidikan dan Kebudayaan.
- Hendrik. (2013). *Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa Tanjung Keranjang Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau*. Ejournal Imu Pemerintahan, Volume 1 Nomor 2.
- Imelda Br Tarigan (2022). Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Potensi Pertanian Desa Di Desa Mampang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Indra (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Mempertahankan Budaya Gotong Royong Di Desa Serakapi Untuk Meningkatkan Pembangunan. Di Desa Serakapi Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.
- Kusnaedi. 2006. Sistem Gotong Royong dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Bali. Jakarta: Departemen Pendidikan dan ITB.
- Kusnaedi, dalam Fandayani. (2010). Upaya Menumbuhkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan. Jakarta: Erlangga.
- Mach Iver dan Page, Soejono Soekanto (2006). Upaya Menumbuhkan Partisipasi Masyarakat. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nugraheni. 2011. Tahap-Tahap Partisipasi dalam Masyarakat. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurma Apriyani, Moh Muchtarom, Dkk (2017). Partisipasi Warga Dalam Gotong Royong Melalui Komunitas Pengelola Sampah Rukun Santoso. Jurnal “*Educitizen*” Edisi (Vol.2 No.2).



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

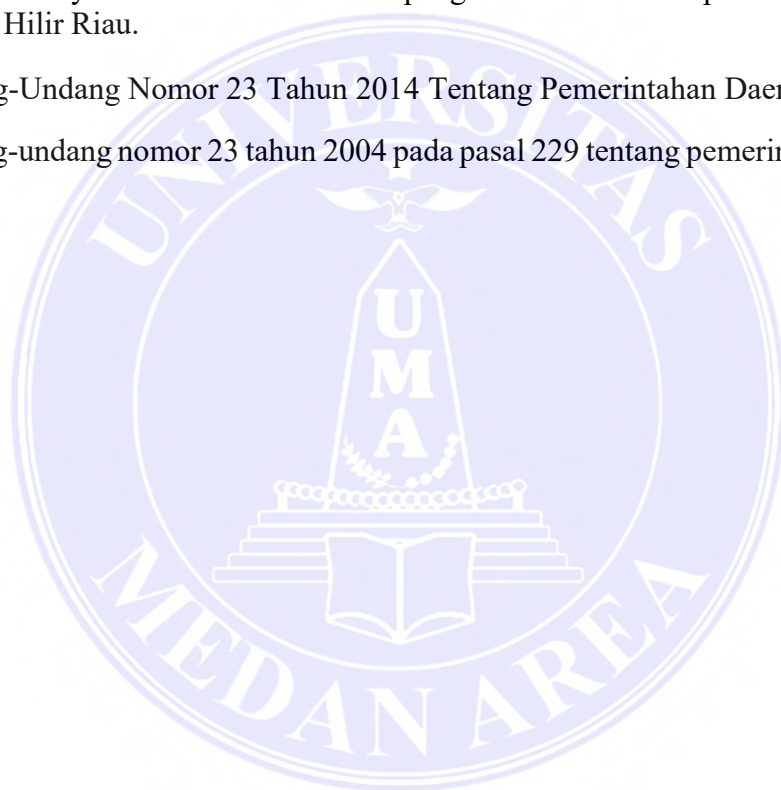
Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Dan Strategi Kota Medan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan pemerintahan republik indonesia nomor 7 tahun 2005 pasal 3 tentang peraruran pemerintah.

Try Mayasari (2021). Peran Pemerintah Desa Dan Masyarakat Dalam Melestarikan Budaya Atib Ko Ambai Di Kepenghuluan Teluk Nilap Kabupaten Rokan Hilir Riau.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang nomor 23 tahun 2004 pada pasal 229 tentang pemerintahan daerah.



## LAMPIRAN

### 1. Pedoman Observasi

#### (PERANAN PEMERINTAH DALAM PROGRAM GOTONG ROYONG DI KELURAHAN SEI KERA HILIR II KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN KOTA MEDAN)

Berikut adalah pedoman observasi yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian sebagai berikut :

1. Lokasi
2. Fasilitas, sarana dan prasarana
3. Pelaksanaan kegiatan / program
4. Respon/ Sikap

Instansi :  
 Nama Program :  
 Lokasi :  
 Tanggal :

No	Yang diamati	Ya	Tidak	Bukti / Indikator
1	Layanan Pengaduan/informasi			
2	Struktur Organisasi - Tupoksi			
3	SOP			
4	Sikap Pegawai			
5	Dokumen Arsip			
6	Visi Misi			
7	Website Instansi			
8	Sosial Media Instansi			
9	Agenda Kegiatan/Program			
10	Laporan Kegiatan/ Program			
11	Kegiatan Sosial Masyarakat			
12	Sikap/ Respon Masyarakat			
13	Sarana Prasarana a. Ruang Kerja b. Ruang Tunggu c. Parkir d. Toilet e. Papan Informasi f. Ruang Arsip / Perpustakaan Kantor g. Perangkat Komputer h. WiFi			

## 2. Pedoman Wawancara

### (PERANAN PEMERINTAH DALAM PROGRAM GOTONG ROYONG DI KELURAHAN SEI KERA HILIR II KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN KOTA MEDAN)

#### A. Identitas Responden

1. N a m a : .....
2. Jenis Kelamin : .....
3. Umur : .....
4. Pekerjaan : .....
5. Pendidikan : .....

#### B. Pertanyaan – pertanyaan

1. (Pertanyaan sesuaikan dengan indikator dari teori yang digunakan kaitkan dengan fokus penelitian) ?

.....  
.....  
.....

2. (Pertanyaan sesuaikan dengan indikator dari teori yang digunakan kaitkan dengan fokus penelitian)?

.....  
.....  
.....

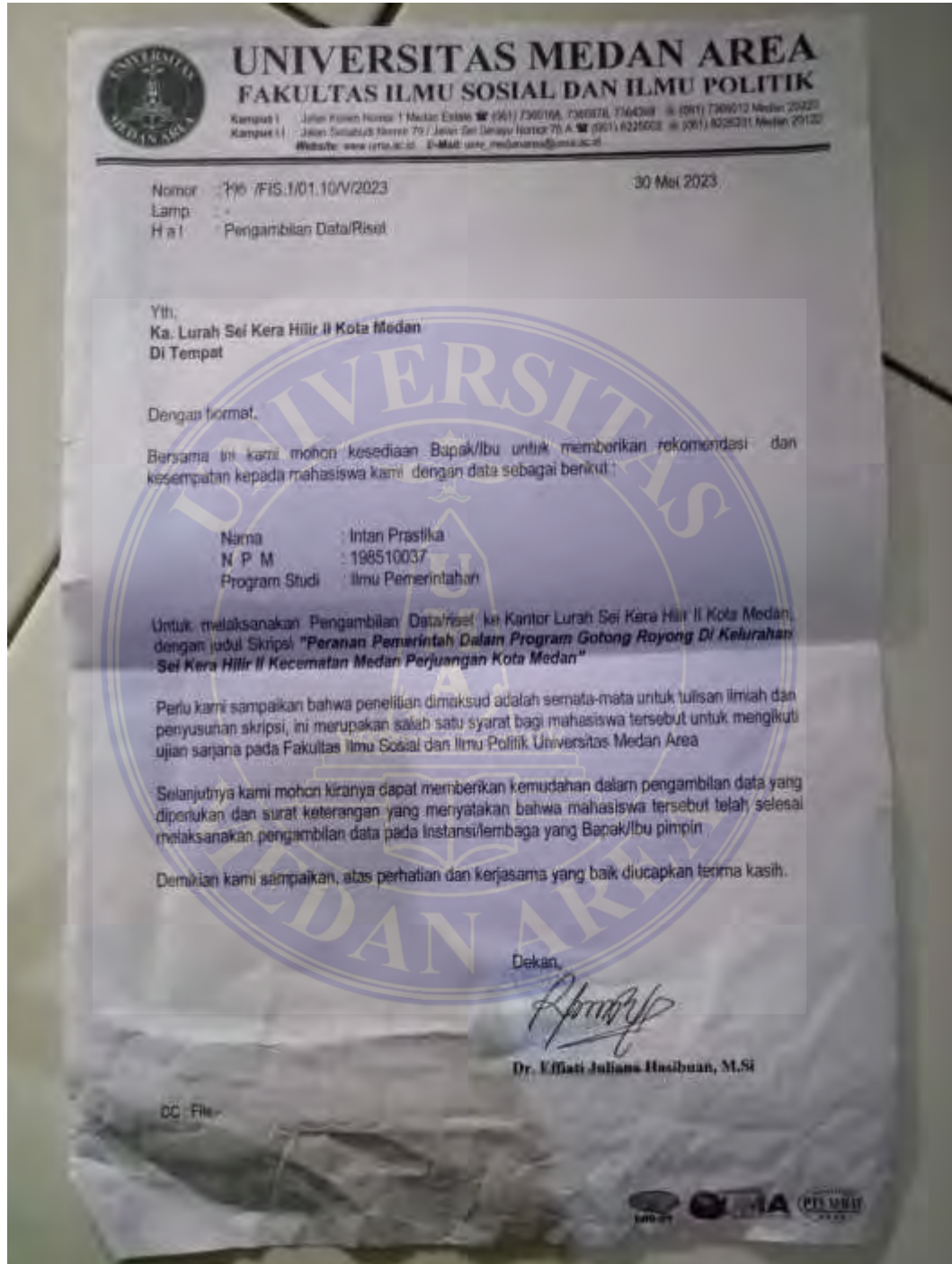
3. (Pertanyaan sesuaikan dengan indikator dari teori yang digunakan kaitkan dengan fokus penelitian)?

.....  
.....  
.....

4. (Pertanyaan sesuaikan dengan indikator dari teori yang digunakan kaitkan dengan fokus penelitian)?

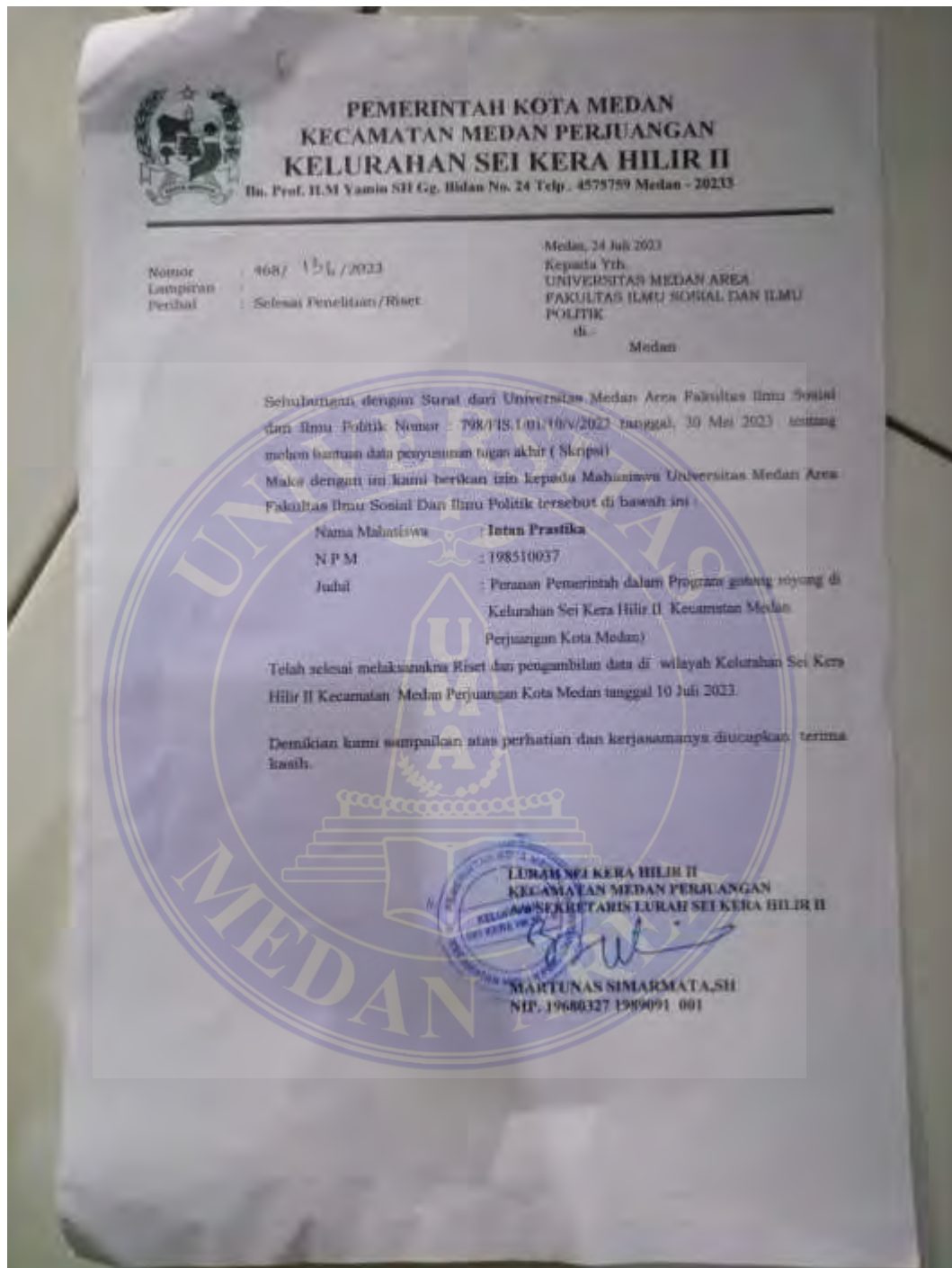
.....  
.....  
.....  
.....

### 3. Surat Riset Lapangan





#### 4. Surat Keterangan Selesai Riset





## 5. Hasil Observasi

### (PERANAN PEMERINTAH DALAM PROGRAM GOTONG ROYONG DI KELURAHAN SEI KERA HILIR II KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN KOTA MEDAN)

Berikut adalah pedoman observasi yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian sebagai berikut :

1. Lokasi
2. Fasilitas, sarana dan prasarana
3. Pelaksanaan kegiatan / program
4. Respon/ Sikap

Instansi : Kantor Lurah Sei Kera Hilir II  
 Nama Program : Gotong Royong  
 Lokasi : Jl. Hm.Yamin Gg. Bidan, Medan Sumatera Utara 20223,  
 Indonesia  
 Tanggal : Selasa, 30 Mei 2023

No	Yang diamati	Ya	Tidak	Bukti / Indikator
1	Layanan Pengaduan/informasi	√		1. Pelayanan atau informasi langsung di kantor lurah sei kera hilir II
2	Struktur Organisasi - Tupoksi	√		Terdaftar di Lampiran dokumentasi penelitian Halaman 43
3	SOP	√		File tersedia dalam bentuk Laporan
4	Sikap Pegawai	√		1. Ramah 2. Sigap ( cepat respon ) Indikator ini dilihat sejak penelitimelakukan penelitian sampai selesai penelitian
5	Dokumen Arsip	√		Dokumen berbentuk buku laporan
6	Visi Misi	√		1. Visi Menjadi kelurahan masa depan yang multikultural, berdaya saing, humanis, sejahtera dan religius. 2. Misi a. Kerjasama b. Kreatifitas dan inovasi c. Kebhinnekaan d. Penanggulangan kemiskinan e. Multikulturalisme.

No	Yang diamati	Ya	Tidak	Bukti / Indikator
7	Website Instansi		√	
8	Sosial media instansi	√		1. Fb : kelurahan skh II 2. Ig : kelurahan skh II
9	Agenda kegiatan/program	√		Agenda kegiatan disampaikan di sub informasi public dan arsip berita Sistem informasi digital kelurahan sei kera hilir II
10	Laporan kegiatan/program	√		Laporan kegiatan disampaikan di sub informasi public dan arsip berita Sistem informasi digital kelurahan sei kera hilir II
11	Kegiatan sosial masyarakat	√		1. Posyandu 2. Posko kamtibmas 3. Perwiritan 1 kelompok 4. Pengajian 1 kelompok 5. Gotong royong di 15 lingkungan
12	Sikap/respon masyarakat	√		1. Baik/ramah 2. Pada program gotong royong ini ada sikap masyarakat yang baik/taat mengikuti prosedur dan arahan dari pemerintah lurah sei kera hilir II, tetapi ada juga yang tidak peduli, dan merasa itu tidak penting Indikator ini dilihat dari hasil observasi beberapa informan.
13	Sarana Prasarana a. Ruang Kerja b. Ruang Tunggu c. Parkir d. Toilet e. Papan informasi f. Ruang Arsip / Perpustakaan Kantor g. Perangkat Komputer h. WiFi	√		Sarana Prasarana di lihat langsung oleh peneliti dan layak pakai.

## 6. Hasil Wawancara

### (PERANAN PEMERINTAH DALAM PROGRAM GOTONG ROYONG DI KELURAHAN SEI KERA HILIR II KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN KOTA MEDAN)

#### Informan Kunci

##### A. Identitas Responden

1. N a m a : Anto Syaputra, SE
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Umur : 46 tahun
4. Pekerjaan : Kepala Lurah
5. Pendidikan : Sarjana

##### B. Pertanyaan – pertanyaan

1. Bagaimana peran pemerintah Kelurahan Sei Kera Hilir II sebagai pengarah atau penggerak dalam memberikan himbauan kepada masyarakat Kelurahan Sei Kera Hili II?

Jawab : Jadi untuk gotong royong ini, kami memberitahukan kepada kepala lingkungan masing-masing untuk menghimbau kepada masyarakat perlingkungan agar ikut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong untuk membersihkan lingkungan setiap minggunya dan kegiatan posyandu. Kami juga menyebarkan selebaran pemberitahuan kepada masyarakat untuk ikut hadir dalam kegiatan gotong royong tersebut.

2. Apakah ada Sosialisasi mengenai program gotong royong dan posyandu yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan sei kera hilir II ?

Jawab : Selalu kita sampaikan, karena masyarakat dengan berbagai latar belakang sehingga tidak sama cara menyerap informasi, terkadang ada masyarakat yang tidak peka, ada juga dengan alasan kesibukan, merasa itu tidak kebutuhan prioritas, sehingga kurang aktif untuk mendapatkan informasi, dan melalui kepala lingkungan juga sudah menyampaikan, misalnya di perwiritan, dan di perkumpulan bapak-bapak/ibu-ibu.

3. Apakah ada SOP yang mengatur tentang program gotong royong yang dilakukan di lingkungan Sei Kera Hilir II.?

Jawab : Semua sesuai dengan prosedur dan ada ketentuan dan peraturan undang-undangnya. Kegiatan gotong royong ini memang tugas dari kantor camat, dan peran kami sebagai petugas pembantu untuk melakukan kegiatan ini secara terperinci, kegiatan ini diturunkan ke kantor lurah untuk dilakukan secara rutin 1 minggu sekali, lalu ada juga yang 1 bulan sekali untuk 1 kecamatan.

## Informan Utama

### A. Identitas Responden

1. N a m a : Martunas Simarmarta, SH
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Umur : 45 tahun
4. Pekerjaan : Sekretaris Lurah
5. Pendidikan : S1

### B. Pertanyaan – pertanyaan

1. Bagaimana peran pemerintah lurah sebagai pengarah atau penggerak dalam gotong royong ialah apakah ada kendala yang bapak hadapi dalam menghimbau masyarakat kelurahan Sei Kera Hilir II untuk ikut serta dalam kegiatan gotong royong,

Jawab : Dari pihak pemerintah kelurahan tidak ada kendala dalam menghimbau masyarakat untuk ikut serta pada kegiatan gotong royong dan posyandu, kami juga tidak terkendala dalam memberikan lembaran berisikan ajakkan untuk kegiatan gotong royong, namun dari masyarakat tersebut yang kurang dalam meningkatkan partisipasinya untuk meluangkan waktu pada kegiatan yang telah terprogram.

2. Bagaimana peran pemerintah lurah dalam memberikan dorongan, atau menstimulus masyarakat terhadap kegiatan gotong royong dan posyandu yang dilakukan di kelurahan sei kera hilir II?

Jawab : kalau berbicara tentang memberikan dorongan, ya bapak lurah dan para pegawainya memberikan motivasi agar bisa meningkatkan partisipasi masyarakat, kami juga memberikan contoh kepada masyarakat dengan turun langsung dalam kegiatan tersebut, agar masyarakat melihat dan juga memiliki rasa tanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnya

3. Bagaimana peran pemerintah lurah dalam memberikan arahan kepada masyarakat melalui regulasi atau aturan-aturan yang di tetapkan dalam penertiban kegiatan gotong royong,?

Jawab : Kalau regulasi ada dan kita sampaikan pada masyarakat, bahwa kegiatan ini turunan dari walikota, kecamatan dan kelurahan, jadi kita menjalankan sesuai dengan undang-undang yang ada undang-undang Peraturan Walikota Medan Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan, mencakup gotong royong kebersihan dan juga Kesehatan seperti posyandu.

#### A. Identitas Responden

1. N a m a : Karmauli Sinaga
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Umur : 36 tahun
4. Pekerjaan : Kepala Seksi Pembangunan Lurah
5. Pendidikan : SLTA/Sederajat

#### B. Pertanyaan – pertanyaan

1. Bagaimana peran pemerintah Lurah sebagai pengarah atau penggerak dalam memberikan himbauan kepada masyarakat Kelurahan Sei Kera Hili II ?

Jawab : kebijakan yang di lakukan dari pemerintah lurah menurut saya sudah baik, kami memberikan pemberitahuan sebelum melakukan kegiatan gotong royong tersebut dan selalu mengajak masyarakat setempat untuk berpartisipasi membersihkan lingkungan yang telah di jadwalkan perlingkungannya, kami memulai kegiatan tersebut pada hari libur agar masyarakat lebih banyak yang ikut dalam kegiatannya

2. Bagaimana peran pemerintah lurah dalam memberikan dorongan, atau menstimulus masyarakat terhadap kegiatan gotong royong dan posyandu yang dilakukan ?

Jawab : Sering kami himbau melalui kepala lingkungan yang ada, kami selalu memberikan dorongan, kami menjelaskan untuk selalu memiliki rasa saling membantu, pekerjaan tidak akan cepat selesai jika dikerjakan secara sendiri sehingga hanya harus dilakukan dengan cara gotong royong

3. Bagaimana peran pemerintah lurah dalam memberikan arahan kepada masyarakat melalui regulasi atau aturan-aturan yang di tetapkan dalam penertiban kegiatan gotong royong ?

Jawab : Untuk kegiatan gotong royong ini semua kami usahakan dengan SOP yang berlaku, terkadang memang ada kendala yang tidak bisa dipungkiri seperti minimnya keikutsertaan dari masyarakat, untuk pemerintah lurah alhamdulillahnya tidak ada kendala dalam melaksanakan kegiatan ini.



#### A. Identitas Responden

1. N a m a : Fiza Sakri
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Umur : 46 tahun
4. Pekerjaan : IRT
5. Pendidikan : SLTA/Sederajat

#### A. Pertanyaan – pertanyaan

1. Sejauh mana peran pemerintah lurah dalam memberikan arahan pada masyarakat untuk kegiatan gotong royong?

Jawab : menurut saya peran lurah dalam memberikan arahan untuk kegiatan gotong royong kepada masyarakat sudah baik dan jelas, kepling perlingkungan juga menghimbau kami masyarakatnya untuk ikut serta dalam kegiatan gotong royong dan posyandu, namun yang saya lihat tidak semua masyarakat ikut membantu membersihkan lingkungannya dan hadir untuk kegiatan posyandunya.

2. Apakah ada sosialisasi yang dilakukan pemerintah Kelurahan Sei Kera Hilir II mengenai pentingnya melakukan gotong royong pada saat ini ?

Jawab : kalau sosialisasi langsung seperti nya tidak ada, tetapi pada saat jadwal kegiatan gotong royong akan berlangsung, dari kepala libgkungannya menyebarkan selebaran untuk kita masyarakat ikut gotong royong pada jadwal yang ditetapkan.

3. Bagaimana pendapat masyarakat terhadap masyarakat yang tidak tertib pada aturan yang telah dibuat oleh kelurahan sei kera hilir II ini dalam kegiatan gotong royong ?

Jawab : setau ibu masyarakat tidak ikut dalam kegiatan gotong royong itu tidak menjadi masalah, dan memang tidak ada sanksi juga, tapi pemerintah lurah sudah menghimbau setiap minggunya untuk ikut serta, namun masyarakat itu sendiri yang tidak mau andil.

B. Identitas Responden

1. N a m a : Fitri
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Umur : 40 tahun
4. Pekerjaan : IRT
5. Pendidikan : SLTA/Sederajat

B. Pertanyaan – pertanyaan

4. Sejauh mana peran pemerintah lurah dalam memberikan arahan pada masyarakat untuk kegiatan gotong royong?

Jawab : kalau menurut saya pemerintah kelurahan sei kera hilir II sudah melakukan tanggung jawabnya untuk memberikan informasi kegiatan gotong royong kepada masyarakat, dengan memberikan undangan untuk ikut pelaksanaan kegiatan gotong royong.

5. Apakah ada sosialisasi yang dilakukan pemerintah Kelurahan Sei Kera Hilir II mengenai pentingnya melakukan gotong royong pada saat ini ?

Jawab :sepertinya untuk sosialisasi tidak ada, hanya saja mereka memberikan semua undangan untuk kami ikut dalam pelaksanaan kegiatan gotong royong setiap minggunya.

6. Bagaimana pendapat masyarakat terhadap masyarakat yang tidak tertib pada aturan yang telah dibuat oleh kelurahan sei kera hilir II ini dalam kegiatan gotong royong ?

Jawab : pendapat saya terhadap masyarakat yang tidak peduli pada kegiatan gotong royong dilingkungannya sendiri harus selalu kita follow up, agar mereka tidak terlena pada perasaan ketidakpeduliannya.





### Kegiatan Gotong-royong Bersama pihak pemerintah Lurah



### Rangkaian kegiatan gotong royong







### BAGAN STURKTUR ORGANISASI KELURAHAN SEI KERA HILIR II – KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN

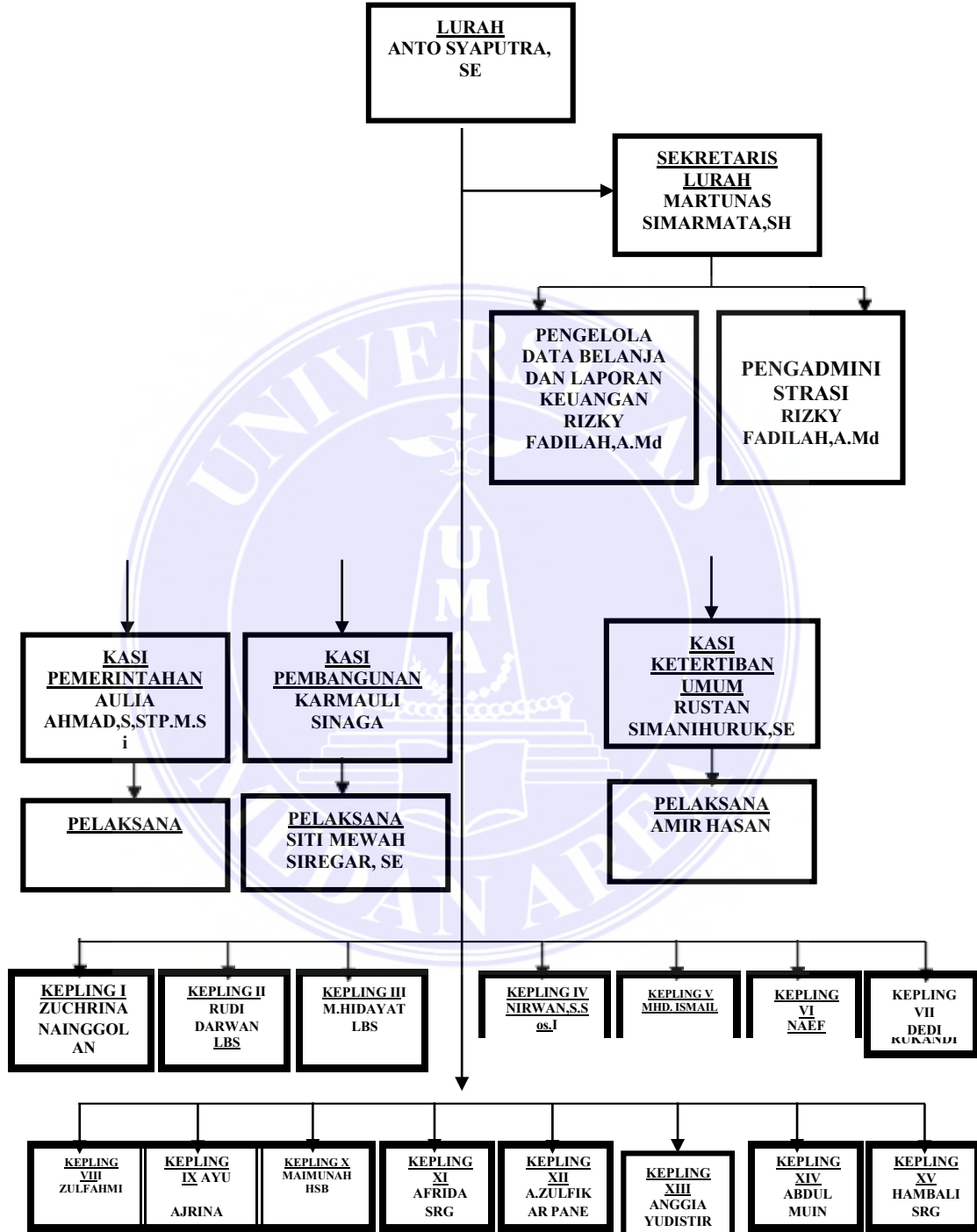


Foto dengan Bapak Anto Syahputra,SE selaku Lurah di Kelurahan Sei Kera Hilir II Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan (Senin, 7 Agustus 2023)



Foto dengan Bapak Martunas Simarmata selaku Sekretaris Kelurahan Sei Kera Hilir II Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan (Rabu, 7 Juni 2023)



Foto dengan Ibu Karmauli Sinaga Selaku Kasi Pembangunan Kelurahan Sei Kera Hilir II Kecamatan Medan Perjuangan( Rabu, 7 Juni 2023)



Foto dengan Ibu Fiza Syahkri selaku masyarakat di Kelurahan Sei Kera Hilir II Kecamatan Medan Perjuangan( Jumat, 9 Juni 2023)



Foto dengan ibu Fitri selaku masyarakat di Kelurahan Sei Kera Hilir II Kecamatan Medan Perjuangan (Jumat, 9 Juni 2023)



Foto dengan ibu Ira selaku masyarakat di Kelurahan Sei Kera Hilir II Kecamatan Medan Perjuangan (Jumat, 9 Juni 2023)

